

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu perubahan kebijakan pada program Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang melibatkan beberapa informan. Sesuai topik penelitian, studi literatur lebih banyak digunakan dalam penelitian ini. Untuk menganalisis perubahan kebijakan, skripsi ini menggunakan kerangka konseptual dari beberapa ahli yang menjelaskan tentang model perubahan kebijakan. Adapun model perubahan kebijakan yang relevan dalam penelitian ini adalah *Multilevel Governance*. *Multilevel Governance* merupakan suatu model perubahan kebijakan dimana para aktor pembuat kebijakan tersebar di berbagai tingkatan yaitu nasional, regional, dan lokal.

Pada Era Orde Baru, antusiasme masyarakat terhadap program KB terus meningkat. Keberhasilan penurunan pertumbuhan penduduk di Indonesia mendapat pengakuan dunia secara luas. Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkat kepemimpinannya dalam pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan. Indonesia menjadi model bagi dunia lain sebagai negara dengan pelaksanaan KB yang berhasil. Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang berhasil mendapatkan *Population Award* dari BKKBN terkait tingginya angka partisipasi pria untuk mengikuti program KB.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Perubahan Kebijakan, Kebijakan Keluarga Berencana, *Multilevel Governance*, Sentralisasi, Desentralisasi

ABSTRACT

This study aims to describe the policy changes in the Family Planning policy. The data collected through some informants using the qualitative descriptive method. This research employed more literature studies in accordance with the topic of study. The policy changes analyzed with conceptual frameworks of policy change models from experts. The relevant model for this study is Multilevel Governance. Multilevel Governance is a policy change model where the actors or policymakers are spread in various level namely national, regional, and local.

During the New Order Era, public enthusiasm for the family planning program increased. The success of the declining number of population in Indonesia gained widespread worldwide recognition. The second Indonesian President, Soeharto, won an award from the United Nations (UN) in the implementation of population development. Indonesia is a country model of the successful implementation of the family planning policy for other countries. Surabaya is one of several cities in East Java that received a Population Award from National Population and Family Planning Board (BKKBN) due to the high number of male participation in family planning programs.

Keywords: Public Policy, Policy Changes, Family Planning Policy, Multi-Level Governance, Centralization, Decentralization